

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengevaluasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak, menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak dan mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif dimana tehnik yang digunakan adalah tehnik observasi teks, lapangan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak Banten.

Kata Kunci:

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD).

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the tax revenue non-metal minerals and stone associated with the original income in the Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lebak, assess the potential for local revenue in Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lebak and find out how much tax contribution of non-metal minerals and stone against the acceptance of local revenue in Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lebak regency. The methodology used in this study is a qualitative research methodology in which the techniques used are observation technique texts, and interviews.

The results showed that tax non-metal minerals and stone did not contribute significantly to revenue in Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lebak Banten.

Keyword:

Mineral Tax Non-Metal and Stone, Contribution Mineral Tax Non-Metal and Stone, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD).